

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Aisyah, Nur. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Amin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*, . Sleman : CV Budi Utama.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Dwiyanto, A., (2017). *Manajemen Pelayanan public: peduli inklusif dan kolaborasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Efendi, Jonaedi; Ibrahim, Johny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empriris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Gadjong, A, A, (2019) *Ilmu Negara*. Makassar: Kretakupa Print.
- Haeun Samsudin, e. t. (2019). *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit*. Banyuasin : Bappeda Litbang.
- Huda, Miftachul, (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta Pustaka: Pelajar.
- Irianto, S., & Shidarta. (2013). *Metode Peneitian Hukum: Konsentelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isrok & Uyun, D, A. (2017). *Ilmu Negara*. Malang: Brawijaya Press
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Muhtaj, M. E. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- J, Kodoatie, R., & Sjarief. (2010). *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: CV. Andi Ofset.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jurdi, F. (2017). *Logika Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Praktik*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Sulastomo, (2008). *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Induksi*, Jakarta: Rajawali Pers

- Setiadi, E. (2017). *System Peradilan Pidana Terpadu Dan System Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat dan Memberdayakan Rakyat; kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Tamboto, H. J., & Manongko, A. (2019). *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir; Berbasis Literasi Ekonomi Dan Modal Sosial*. Malang: C.V Seribu Bintang.
- Tripa, Sulaiman. (2019). *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Wahid, A., & Akbar, N. (2020). *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Depok: Gema Insani Digital Publishing.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

## **JURNAL DAN ARTIKEL**

Ahmad, M. (2010). Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (Gepeng). *Jurnal Penelitian, Volume 7, Nomor 2, Nopember 2010, 7(9)*, 1–16.

Asshiddiqie, J. (2006). L'école de Palo Alto. *L'école de Palo Alto*, 1–17.  
<https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>

Di, K., & Tengah, J. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal, 1(2)*.  
<https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.472>

Fadri, Z. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta. *Komunitas, 10(1)*, 1–19. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>

Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam UU Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum, XVII(67)*, 419–432.

Guna, P., & Tujuan, M. (2015). Negara Indonesia adalah Negara yang berdiri sebagai wujud dari perjuangan secara menyeluruh dari rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, mulai dari pada masa, 6, 90–105.

Marilang. (2012). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi, 9(2)*, 260–286.

Margaretha, A. (2019). Konsep Welfare State Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Administrasi Negara, October*.

Murni, R. (2016). Peran Jejaring Kerja dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi. *Sosio Konsepsia, 45–65*.

Perdana. (2018). Keberadaan Konsep Rule Of Law di Dalam Teori Negara Hukum. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9)*, 1689–1699.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

- Ridlwana, Z. (2014). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia*, 5(2), 141–152. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>
- Sitepu, A., & Nainggolan, T. (2019). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Terpadu Pada Program Penanganan Fakir Miskin Di Deli Serdang. *Sosio Konsepsia*, 8(2). doi: 10.33007/ska.v8i2.1628
- Suharto, E. (2006). Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara : Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia? *Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State Dan Terobosan Melalui Desentralisasi- Otonomi Di Indonesia*, 1–15.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Pendahuluan Dewasa ini , wacana mengenai negara kesejahteraan ( *welfare state* ) menjadi didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standa. *Sospol*, 2(1), 103–122.
- Suradi. (2007). Pembangunan manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, (1), 1–11.
- Yunus, N. R., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2018). Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara, (September).
- Zefianningsih, B. D., Wibhawa, B., & Rachim, H. A. (2016). Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13600>

## **SKRIPSI**

- Ade Putra, S. (2018) *Pengawasan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Serang*. (Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
- Dwitanto Putro, R. (2015). *Pembinaan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (Pgot) Di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang*. (Skripsi Universitas Negeri Semarang)
- Hendra Wijaya, M. (2013). *Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law*. (Tesis Universitas Udayana)
- Nur Rohmah, N. (2017). *Model Penanganan bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas*. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang)

Yedija, G. Y. (2017). *Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak-Dampak Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan*. (Skripsi Universitas Sumatra Utara).

## INTERNET

Agus Fauzul, M, (2020, Febuari 2), *Syarat dan Cara Dapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)*, Kompas.com Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/17/16134581/syarat-dan-cara-dapatkan-kartu-indonesia-pintar-kip?page=all>.

Fadil Utomo, A, (2020, Maret 10), *Bekasi 23 Tahun Angka Kemiskinan Masih Tinggi*. Pojok Bekasi. Diakses melalui <https://bekasi.pojoksatu.id/baca/bekasi-23-tahun-angka-kemiskinan-masih-tinggi>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (2020) Diakses melalui <https://kbbi.web.id/fakir>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (2020) Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/miskin>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (2020) Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/gelandang>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (2020) Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/emis>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (2020) Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (2020) Diakses melalui <https://kbbi.web.id/negara>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (2020) Diakses melalui <https://kbbi.web.id/hukum>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (2020) Diakses melalui <https://kbbi.web.id/sejahtera>

Nugroho, Adi, (2020, Maret 10), *Kemiskinan Bekasi menurun, BPS klaim karena banyak warga kerja di perusahaan*. Merdeka.com. Diakses melalui.

Merdeka.com.<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemiskinan-bekasi-menurun-bps-klaim-karena-banyak-warga-kerja-di-perusahaan.html>.

Susanto, I. (2020, Juli 1), *Program Keluarga Harapan*. Diakses melalui <https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>. Jum'at 1 Juli 2020.

\_\_\_\_\_,(2019, Juli 15) Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>,

\_\_\_\_\_, (2020), Diakses melalui <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

\_\_\_\_\_, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2000*”, Diakses melalui <http://www.bappenas.go.id>,

\_\_\_\_\_, (2019, November 28) *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019*” Diakses melalui <http://www.bps.go.id>

\_\_\_\_\_, (2018, Mei 1), Diakses melalui <http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran/>

\_\_\_\_\_, (2019, Desember 24), *Berlanjutnya Program Kesehatan Warga Kota Bekasi Berbasis NIK*” Diakses melalui <https://www.bekasikota.go.id/detail/berlanjutnya-program-kesehatan-warga-kota-bekasi-berbasis-nik-2020>